



Edit



Hapus

[Beranda](#) > [News](#)

Konten dari Pengguna

# Pancasila dalam Aksi: Putusan MK tentang Pendidikan Gratis yang Bersejarah

**FX Risang Baskara**

Akademisi yang percaya teknologi harus inklusif. Mengajar di Universitas Sanata Dharma, meneliti tentang teknologi pendidikan. Menulis untuk berbagi, berkarya untuk...

31 Mei 2025 17:31 WIB · waktu baca 8 menit



0



0



*Tulisan dari FX Risang Baskara tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan*

Tepat satu minggu menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila ke-80 pada 1 Juni 2025, Mahkamah Konstitusi memberikan hadiah istimewa bagi bangsa Indonesia. Putusan bersejarah tentang kewajiban pemerintah menggratiskan pendidikan dasar, baik di sekolah negeri maupun swasta, datang seolah menjadi pengingat bahwa ideologi Pancasila bukan sekadar simbol, melainkan panduan hidup yang harus diwujudkan dalam kebijakan konkret.

Tema peringatan Harlah Pancasila 2025, "Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya", mendapat momentum yang tepat melalui putusan MK ini. Mari kita telaah bagaimana keputusan judicial review ini menjadi cerminan sempurna dari pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa.

## Sila Kelima dalam Aksi: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Logo peringatan Harlah Pancasila 2025 menampilkan "lima elemen menyerupai tiang yang kokoh, melambangkan lima sila dalam Pancasila sebagai pondasi utama kehidupan berbangsa dan



diskriminatif secara struktural. Dua anak yang sama-sama warga negara Indonesia, sama-sama memiliki hak konstitusional untuk mendapat pendidikan, namun diperlakukan berbeda hanya karena faktor ketersediaan kursi di sekolah negeri. Anak yang beruntung mendapat tempat di sekolah negeri bisa bersekolah gratis, sementara yang tidak beruntung harus menanggung beban finansial di sekolah swasta.

Ini bukan keadilan sosial. Ini adalah bentuk diskriminasi yang tersamar, di mana nasib pendidikan anak ditentukan oleh faktor keberuntungan dan kemampuan ekonomi keluarga, bukan oleh hak konstitusionalnya sebagai warga negara.

Putusan MK mengakhiri diskriminasi tersebut. Ketika hakim konstitusi M. Guntur Hamzah menyatakan bahwa "negara tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya" meski pendidikan dasar diselenggarakan oleh pihak swasta, sesungguhnya ia sedang menegakkan prinsip keadilan sosial dalam maknanya yang paling fundamental.

## Burung Niskala Hema: Simbol Transformasi Pendidikan

Logo Harlah Pancasila 2025 menghadirkan simbolisme "Burung Niskala Hema", di mana Niskala berarti "kokoh dan kuat" serta "sesuatu yang tidak dapat dilihat secara fisik namun tertanam dalam pikir, laku, dan jiwa," sementara Hema bermakna "emas" yang melambangkan sesuatu yang berharga dan kejayaan.

Putusan MK tentang pendidikan gratis adalah perwujudan sempurna dari filosofi Burung Niskala Hema ini. Keadilan dalam pendidikan memang tidak selalu terlihat secara kasat mata, seperti makna "niskala", namun dampaknya tertanam kuat dalam kehidupan masyarakat. Seorang anak yang mendapat akses pendidikan berkualitas tanpa hambatan ekonomi akan tumbuh menjadi generasi emas ("hema") yang membawa Indonesia menuju kejayaan.

Selama puluhan tahun, kita memiliki sistem pendidikan yang "nampak" adil di permukaan, ada sekolah negeri gratis, namun "niskala" atau secara tidak kasat mata menciptakan ketidakadilan struktural. Putusan MK kini membalikkan situasi tersebut: menciptakan keadilan yang "niskala", tidak selalu terlihat di



Elemen "buku terbuka" dalam logo Harlah Pancasila 2025 memiliki makna yang sangat dalam: "menunjukkan semangat keberanian, kemerdekaan, dan kesiapan untuk terbang tinggi menggapai cita-cita." Lebih jauh lagi, "buku ini menyiratkan bahwa pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan melalui pendidikan Pancasila sejak dini dan secara berkelanjutan."

Putusan MK membuka "buku" pendidikan Indonesia pada halaman yang baru. Halaman di mana setiap anak, terlepas dari latar belakang ekonomi keluarganya, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Ini adalah "keberanian" untuk mengambil langkah transformatif yang mungkin tidak populer secara politis karena memerlukan alokasi anggaran yang besar.

Ini juga adalah "kemerdekaan" dalam makna yang sesungguhnya, yaitu memerdekakan anak-anak Indonesia dari belenggu ketidakadilan pendidikan yang selama ini mengunci potensi mereka. Ketika setiap anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, mereka memiliki "kesiapan untuk terbang tinggi menggapai cita-cita", baik cita-cita personal maupun cita-cita bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.

Pendidikan Gratis: Pilar Keadilan Sosial. Sumber: Ilustrasi generatif DALL-E, OpenAI.

## Segitiga Emas: Manusia sebagai Pusat Pembangunan

Logo Harlah Pancasila 2025 menampilkan "ilustrasi manusia dengan segitiga emas ke atas" yang "melambangkan karakter manusia" dan "mencerminkan manusia sebagai pusat dan tujuan utama dari pembangunan karakter bangsa."

Putusan MK tentang pendidikan gratis adalah implementasi sempurna dari filosofi *human-centered development* ini. Selama ini, kebijakan pendidikan sering kali terjebak dalam perspektif birokratis atau ekonomis, seperti berapa anggaran yang tersedia, berapa sekolah yang bisa dibangun, berapa guru yang bisa direkrut. Perspektif ini, meski penting, sering melupakan esensi utama: manusia sebagai subjek yang berhak mendapat perlakuan adil.

Putusan MK membalikkan perspektif tersebut. Ia menempatkan hak anak untuk mendapat pendidikan sebagai titik berangkat, bukan sebagai hasil akhir dari kalkulasi anggaran. Ketika Guntur Hamzah



pusat dari seluruh sistem pendidikan.

"Segitiga emas" yang mengarah ke atas dalam logo melambangkan arah perkembangan yang positif dan transformatif. Putusan MK membuka jalan bagi perkembangan karakter bangsa yang lebih adil, di mana setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya tanpa dibatasi oleh kondisi ekonomi keluarga.

## Memperkokoh Ideologi Pancasila Melalui Implementasi Konkret

Tema "Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya" mendapat ujian nyata melalui putusan MK ini. Selama ini, kita sering berbicara tentang Pancasila dalam konteks yang abstrak dan filosofis. Pidato-pidato kenegaraan penuh dengan referensi Pancasila, namun implementasi konkretnya dalam kebijakan publik sering kali setengah hati.

Putusan MK menunjukkan bagaimana ideologi Pancasila seharusnya "diperkokoh", bukan melalui retorika yang kosong semata, melainkan melalui keputusan-keputusan yang berani dan transformatif yang memihak pada keadilan.

Logo Harlah Pancasila 2025 menyebutkan bahwa "ideologi Pancasila selalu tertanam dalam pikir, laku, dan jiwa manusia Indonesia secara sadar atau tanpa disadari." Putusan MK adalah contoh bagaimana Pancasila "tertanam dalam pikir" para hakim konstitusi yang memahami bahwa keadilan bukan sekadar konsep abstrak, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan konkret.

Putusan ini juga menunjukkan bagaimana Pancasila harus "tertanam dalam laku", dalam tindakan nyata pemerintah untuk memastikan setiap anak mendapat pendidikan berkualitas. Dan pada akhirnya, putusan ini akan membuat Pancasila "tertanam dalam jiwa" generasi mendatang yang tumbuh dalam sistem pendidikan yang adil dan merata.

## Indonesia Raya dalam Pendidikan yang Berkeadilan

Lagu "Indonesia Raya" ciptaan W.R. Supratman bukan hanya himne nasional, tetapi juga visi tentang Indonesia yang besar, maju, dan bermartabat. Namun, bagaimana mungkin kita mencapai "Indonesia

anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, kita tidak hanya menciptakan keadilan dalam makna yang sempit, tetapi juga membangun fondasi bagi Indonesia yang lebih besar dan bermartabat.

Bayangkan potensi yang selama ini terpendam karena anak-anak berbakat dari keluarga kurang mampu tidak bisa mengakses pendidikan berkualitas. Berapa banyak ilmuwan, seniman, pemimpin, dan inovator yang hilang karena sistem pendidikan yang diskriminatif? Putusan MK membuka peluang bagi potensi-potensi tersebut untuk berkembang, sehingga Indonesia benar-benar bisa mencapai status "raya" dalam arti yang sesungguhnya.

### Tantangan dan Peluang Implementasi

Seperti halnya setiap visi besar, implementasi putusan MK ini akan menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Logo Harlah Pancasila 2025 dengan "pilar lima tiang yang kokoh" mengingatkan kita bahwa pembangunan yang berkelanjutan memerlukan fondasi yang kuat.

Tantangan pertama adalah aspek pendanaan. Untuk memberikan subsidi penuh kepada sekolah swasta, pemerintah memerlukan anggaran tambahan yang sangat signifikan. Namun, ini bukan sekadar soal uang; ini adalah soal prioritas politik dan komitmen terhadap masa depan bangsa.

Tantangan kedua adalah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang memastikan dana publik digunakan secara efektif. Seperti makna "niskala" dalam logo, sesuatu yang tidak terlihat namun penting, pengawasan harus bekerja secara efektif meski tidak selalu kasat mata.

Tantangan ketiga adalah mengubah paradigma pendidikan dari sistem yang berbasis kepemilikan (negeri vs swasta) menjadi sistem yang berbasis kualitas dan aksesibilitas. Ini memerlukan perubahan mindset dari semua pemangku kepentingan.

Namun, di balik tantangan tersebut terbuka peluang emas untuk melakukan transformasi pendidikan yang komprehensif. Peluang untuk menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya gratis, tetapi juga berkualitas dan relevan dengan kebutuhan zaman.

### Refleksi Menjelang Hari Lahir Pancasila



Pancasila bukan sekadar ideologi yang indah dalam teori, tetapi panduan praktis untuk menciptakan Indonesia yang adil dan makmur. Putusan MK menunjukkan bahwa ketika lembaga-lembaga negara bekerja sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, keajaiban transformasi sosial bisa terjadi.

Logo "Burung Niskala Hema" dengan " Pilar kokoh cengkramannya menancap dalam lubuk sanubari, membawa Indonesia ke masa kejayaannya" menjadi metafora yang tepat untuk putusan MK ini. Keputusan yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, meski mungkin tidak populer secara politis karena memerlukan investasi besar, akan membawa Indonesia menuju kejayaan melalui generasi yang terdidik dengan baik.

Indonesia Raya: Dari Sekolah ke Masa Depan. Sumber: Ilustrasi generatif DALL-E, OpenAI.

## Penutup: Momentum untuk Mewujudkan Indonesia Raya

Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Mei 2025 tentang pendidikan gratis adalah hadiah terbaik menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila ke-80. Ia menunjukkan bahwa Pancasila bukan sekadar warisan sejarah yang harus dihormati, tetapi ideologi hidup yang harus terus diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ketika kita merayakan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2025 nanti, mari kita rayakan bukan hanya sebagai momen nostalgia, tetapi sebagai momentum untuk memperkuat komitmen kita pada nilai-nilai Pancasila. Putusan MK tentang pendidikan gratis adalah bukti bahwa ketika kita sungguh-sungguh mengamalkan Pancasila, transformasi sosial yang bermakna bisa terjadi.

Seperti makna "Burung Niskala Hema" yang membawa Indonesia menuju kejayaan, putusan MK ini bisa menjadi titik tolak bagi transformasi yang lebih besar dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pendidikan yang berkeadilan, kita bisa melangkah menuju "Indonesia Raya" dalam makna yang sesungguhnya, sebuah negara yang besar bukan hanya dalam ukuran geografis, tetapi dalam keadilan, kemajuan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya.

Selamat Hari Lahir Pancasila ke-80. Semoga putusan MK tentang pendidikan gratis menjadi awal dari implementasi Pancasila yang

U

Transitional loading...  
Loading...

U

Transitional loading...  
Loading...





